

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



LAPORAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
8. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

2. Penatausahaan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

VI. Program Pengembangan Perumahan

1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat
2. Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
3. Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
4. Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat
5. Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota
6. Sosialisasi Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam

VII. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1. Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
2. Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
3. Updating Database Kawasan Kumuh
4. Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)

VIII. Program Pengelolaan Pertanahan

1. Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
2. Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
3. Bimtek Pengelolaan Pertanahan
4. Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan
5. Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
6. Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
7. Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi

Total Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 sebesar Rp. 16.809.306.832,00 dan realisasi keuangan Rp. 13.733.191.785,85 atau 81,70% dan realisasi fisik 99,64%. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.393.329.950,00 dan realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.347.547.311,00 atau sebesar 96,71% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.465.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 2.667.950,00 atau 77,00% dengan realisasi fisik 100%, berupa surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan dengan hasil berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.580.528,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 197.580.516,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%, pelayanan jasa sopir kantor selama 12 bulan dengan outcome terpenuhinya kebutuhan transportasi di dinas.
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.997.400,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 89.976.060,00 atau 99,98% dengan realisasi fisik 100% berupa ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.398.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 57.333.014,00 atau 99,89% dengan realisasi fisik 100% berupa barang cetakan atau penggandaan administrasi kantor selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.992.059,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 8.869.740,00 atau 98,64% dengan realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama 12 bulan.

- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.291.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 8.160.000,00 atau 87,83% dengan realisasi fisik 100% berupa surat kabar lokal dan nasional. Dengan outcome berupa meningkatnya sumberdaya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 938.605.963,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 904.715.031,00 atau 96,39% dengan realisasi fisik 100% berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi lintas sektor keluar dan dalam daerah dengan realisasi 100%.
 - h. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 78.245.000,00 atau 88,91% dengan realisasi fisik 100% berupa publikasi. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi 100%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.148.305,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.562.956.464,00 atau 92,72% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.910.500,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 141.535.114,00 atau 99,04% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.750.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 31.694.000,00 atau 99,82% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

pemeliharaan selama 1 tahun dengan hasil terpeliharanya komputer dengan baik dan lancar dalam penggunaan.

- c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.487.805,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 389.727.350,00 atau 90,11% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil terlaksananya pekerjaan dengan baik dengan realisasi sebesar 100%.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.527.800,00 dengan realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 57.527.800,00 atau 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.527.800,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 57.527.800,00 atau 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Dengan hasil (outcome) berjalannya disiplin aparat sipil negara pada organisasi perangkat daerah.
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.220.800,00 dengan realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 61.600.700,00 atau 87,69% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.220.800,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 61.600.700,00 atau 73,14% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparat mengikuti bimtek perundang-undangan. Dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparat untuk mendukung tupoksi.
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.589.000,00 terealisasi sampai

Desember 2019 sebesar Rp. 570.501.100,00 atau 87,69% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.762.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 43.810.100,00 atau 66,62% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan perencanaan RKA dan DPA SKPD. Dengan hasil (outcome) terciptanya perencanaan dan penganggaran dinas dengan realisasi 100%
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312.322.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 285.890.300,00 atau 91,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah dan honorarium pengelola SIPKD. Dengan hasil (outcome) terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan realisasi 100%
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.630.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 29.466.140,00 atau 59,37% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan kinerja, perjanjian kinerja, renja, LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dan realisasi 100%.
- d. Monitoring dan Evaluasi Program dan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.889.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 60.085.560,00 atau 87,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan OPD secara terpadu. Dengan hasil (outcome) tercapainya target pelaksanaan program yang berkualitas.
- e. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.986.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 151.249.000,00 atau 98,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terciptanya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang OPD dengan baik dan tertata.

- 6) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 1.803.496.500,00 teralisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.688.657.540,00 atau 93,63% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.700.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 86.361.000,00 atau 80,94% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota. Dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.852.500,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 106.217.400,00 atau 85,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
 - c. Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 343.217.440,00 atau 97,78% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 682.944.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 638.940.400,00 atau 93,56% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terupdatenya data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat.

- e. Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 334.674.700,00 atau 97,29% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota. Dengan hasil Tersusunnya Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota.
 - f. Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah Yang Aman Terhadap Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 179.246.600,00 atau 91,92% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan. Dengan hasil Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan terhadap Rumah yang Aman Bencana Alam.
- 7) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 11.725.355.630,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 8.992.892.083,85,00 atau 76,70% dan realisasi fisik sebesar 96,82% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.153.088.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.114.274.865,00 atau 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran (Kawasan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat).
 - b. Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.298.511.630,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 5.663.426.492,35 atau 68,25% dan realisasi fisik sebesar 87,27% berupa

Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) pada Kawasan Sei Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Strategis Danau Singkarak Kabupaten Solok dan Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman.

- c. Updating Database Kawasan Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.756.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 842.470.750,00 atau 96,42% dan realisasi fisik sebesar 87,27% berupa terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat. Dengan hasil Tersedianya Database Kawasan Kumuh Kab /Kota Se-Sumatera Barat.
 - d. Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.372.719.976,50 atau 98,05% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus. Dengan hasil tersedianya PSU di Kawasan Strategis dan khusus.
- 8) Program Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran Rp. 487.638.847,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 451.508.787,00 atau 92,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Bimtek Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.708.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 77.893.750,00 atau 89,83% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan. Dengan hasil meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pengelolaan pertanahan.
 - b. Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.244.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 46.306.796,00 atau 92,16% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan

penanganan masalah pengelolaan pertanahan. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan.

- c. Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.682.847,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 103.287.916,00 atau 96,82% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya pembinaan dan monitoring pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan hasil meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- d. Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.236.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 60.753.755,00 atau 97,62% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terwujudnya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.
- e. Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.808.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 77.199.960,00 atau 91,03% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
- f. Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.208.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 Rp. 41.124.000,00 atau 93,02% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan monitoring pemberian izin lokasi. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pemberian izin lokasi.
- g. Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.752.000,00 terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 44.942.610,00 atau 85,20% dan realisasi fisik

100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya PemahamanAparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.

B. *OUTCOME PROGRAM*

Outcome yang diharapkan dalam pelaksanaan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM	<i>OUTCOME</i>	TARGET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	1) 100%
		2) Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	2) Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)

No.	PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		3) Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	3) 100 %
		4) Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	4) 100 %
6	Pengembangan Perumahan	1) Persentase rumah layak huni 2) Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman 3) Tersedianya database perumahan dan permukiman	1) 83,56 % 2) 1 paket 3) 1 dokumen
7	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1) Penurunan luasan kawasan kumuh 2) Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	1) 13,5 % 2) 75 %
8	Pengelolaan Pertanahan	Jumlah Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Barat	87 %

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Peningkatan Rumah Layak Huni	3%

Sedangkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Peningkatan Rumah Layak Huni	3%	7%	233%

Indikator peningkatan rumah layak huni dihitung berdasarkan kepada berkurangnya persentase rumah tidak layak huni khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai bantuan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2019, target kinerja tersebut tercapai dengan sangat baik, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- Meningkatnya kegiatan berupa bantuan stimulan untuk rumah layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari pemerintah pusat untuk Provinsi Sumatera Barat.
- Tingginya tingkat keswadayaan masyarakat terhadap kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No.	Program	Permasalahan	Solusi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		

No.	Program	Permasalahan	Solusi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perlu sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja OPD	Ditingkatkan sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD
		Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai	Perencanaan target pendanaan yang lebih baik
6	Program Pengembangan Perumahan	Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan	Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan	Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan
		Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi (10-15) Hektar	Melengkapi data kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi
		Belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas Kabupaten / Kota	Melengkapi data PSU kawasan permukiman lintas Kabupaten/ Kota
8	Program Pengelolaan Pertanahan	Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan	Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan

E. PENGHARGAAN NASIONAL YANG DITERIMA

Tidak ada penghargaan tingkat nasional yang diterima.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2019
